

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN)

Pra Gemini¹, Nurmega², Muhammad Askar³
^{1,2,3}STIM LPI Makassar, Jl. Bung, Makassar, Indonesia
Email: taliding2012@gmail.com

Article History

Received: 05-07-2025

Revision: 16-07-2025

Accepted: 16-07-2025

Published: 03-08-2025

Abstract. This study aims to analyze the effectiveness and efficiency of budget realization as a basis for evaluating the performance of the State Treasury Service Office (KPPN) Makassar I for the period 2020 to 2024. The research uses a descriptive quantitative method with secondary data derived from budget realization reports and the number of Payment Order Letters (SP2D) issued to partner work units of KPPN Makassar I. Effectiveness is measured by the ratio of realization to budget allocation, while efficiency is measured by the ratio of realization to the number of SP2D issued. The results show that the effectiveness of budget realization over five years consistently falls under the "effective" category, with ratios ranging from 93,98% to 97,04%. Meanwhile, efficiency fluctuated but showed significant improvement in the last two years, with the highest value of Rp. 210.523.391 per SP2D in 2023. These findings indicate that KPPN Makassar I has demonstrated good performance in budget disbursement. Therefore, the hypothesis stating that the effectiveness and efficiency of budget realization at KPPN Makassar I meet good criteria is accepted.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Budget Realization, KPPN

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran sebagai dasar untuk menilai kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar I selama periode tahun 2020 hingga 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran dan jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari satuan kerja mitra KPPN Makassar I. Efektivitas diukur melalui rasio antara realisasi dan pagu anggaran, sedangkan efisiensi diukur dari rasio realisasi terhadap jumlah SP2D yang diterbitkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas realisasi anggaran selama lima tahun berada pada kategori efektif dengan rasio berkisar antara 93,98% hingga 97,04%. Sementara itu, efisiensi mengalami fluktuasi namun meningkat signifikan pada dua tahun terakhir dengan nilai tertinggi sebesar Rp. 210.523.391 per SP2D pada tahun 2023. Hasil ini mengindikasikan bahwa kinerja KPPN Makassar I dalam menyalurkan anggaran tergolong baik. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran pada KPPN Makassar I memenuhi kriteria baik dinyatakan diterima.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Realisasi Anggaran, KPPN

How to Cite: Gemini, P. et.al. (2025). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (3), 6293-6303. [10.54373/ifjeb.v5i3.3700](https://doi.org/10.54373/ifjeb.v5i3.3700)

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai unit vertikal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan memiliki peran yang sangat strategis. KPPN bertugas menyalurkan dana APBN kepada satuan kerja pemerintah, serta menjadi pelaksana fungsi perbendaharaan negara di daerah. Oleh karena itu, keberhasilan KPPN dalam menjalankan fungsinya dapat menjadi indikator kinerja pelaksanaan anggaran secara nasional (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2022).

Permendagri No. 13 tahun 2006 menjelaskan bahwa efisiensi adalah hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah dapat tercapai manfaat tertentu. Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Output adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.

Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target anggaran penerimaan. Menurut Anggriani (2010) dalam Devinci (2023), efektivitas merupakan hubungan antara hasil yang dicapai dengan tujuan atau sasaran yang diharapkan. Dengan kata lain efektivitas adalah hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Semakin besar kontribusi hasil terhadap harapan atau tujuan atau target dari suatu kegiatan, semakin efektif organisasi tersebut, jadi efektivitas berfokus pada *outcome* atau hasil yang terjadi.

Menilai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif (Devinci, 2023).

Efektivitas dan efisiensi dalam realisasi anggaran merupakan dua indikator penting dalam menilai kinerja suatu instansi pemerintah, termasuk KPPN. Efektivitas menggambarkan sejauh mana suatu program atau kegiatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan

efisiensi mengukur perbandingan antara input dan output atau hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan (Mardiasmo, 2018). Dengan demikian, meskipun suatu KPPN memiliki tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, hal tersebut belum tentu menunjukkan kinerja yang baik jika tidak disertai dengan efisiensi dalam pelaksanaannya.

KPPN Makassar I, sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, memiliki wilayah kerja yang luas dan mencakup berbagai satuan kerja di tingkat pusat maupun daerah. Wilayah ini mencerminkan kompleksitas dalam pelaksanaan anggaran, sehingga memerlukan pengelolaan yang baik dan tepat waktu. Efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran di KPPN Makassar I menjadi penting karena berdampak langsung pada kelancaran operasional satuan kerja serta pelayanan publik di wilayah kerjanya. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPPN Makassar I mengelola proses pencairan dana APBN, melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, serta menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menjadi salah satu instrumen akuntabilitas kinerja keuangan.

Tingginya minat penelitian mengenai efisiensi dan efektivitas LRA, khususnya pada KPPN Makassar I, disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, KPPN ini memiliki peran strategis dalam menyalurkan dana ke berbagai satuan kerja di Sulawesi Selatan. Kedua, masih banyak ditemukan masalah umum seperti penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun, sisa anggaran tidak terserap, dan keterlambatan proses pencairan. Ketiga, LRA menjadi cerminan kinerja keuangan yang dapat dinilai secara objektif untuk mengetahui apakah pelaksanaan APBN sudah sesuai dengan prinsip *good governance*.

Penilaian efektivitas dan efisiensi juga memberikan manfaat praktis dalam pengambilan keputusan manajerial dan perbaikan kebijakan. Dari sisi manajerial, hasil evaluasi dapat menjadi dasar bagi KPPN untuk mengidentifikasi area kritis yang memerlukan intervensi seperti perbaikan proses bisnis, peningkatan kualitas SDM, atau optimalisasi sistem informasi. Dari sisi kebijakan, hasil analisis ini dapat dijadikan dasar oleh Kementerian Keuangan dalam merumuskan strategi peningkatan akuntabilitas fiskal serta tata kelola keuangan negara yang lebih baik di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran dalam menilai kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Penelitian ini berfokus pada data kuantitatif yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran satuan kerja mitra KPPN serta jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi seberapa efektif penyaluran anggaran

yang difasilitasi oleh KPPN dalam mencapai realisasi anggaran oleh satuan kerja serta seberapa efisien proses penyaluran tersebut dari sudut pandang administratif. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar I.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data tahunan terkait pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja mitra yang dilayani oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar I termasuk data pagu anggaran, realisasi anggaran, dan jumlah dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan.. Sampel dalam penelitian ini yaitu data tahunan yang meliputi pagu anggaran, realisasi anggaran, dan jumlah SP2D dari satuan kerja mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar I tahun 2020-2021. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.

HASIL

Rasio Efektivitas KPPN Makassar I tahun 2020-2021

Tabel di bawah ini memperlihatkan hasil perhitungan rasio Efektivitas KPPN Makassar I tahun 2020-2021:

Tabel 1. Perhitungan Rasio Efektivitas tahun 2020-2021

Tahun	Efektivitas	Keterangan
2020	93,98 %	Efektif
2021	96,91 %	Efektif

Sumber: OM-SPAN (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa efektivitas realisasi anggaran pada tahun 2020 mencapai 93,98% yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran satuan kerja berhasil direalisasikan pada tahun 2020. Angka ini tergolong dalam kategori efektif karena berada dalam rentang 80%-100%.

Tabel diatas juga dapat menjelaskan bahwa pada tahun 2021, efektivitas meningkat menjadi 96,91% yang menunjukkan perbaikan dalam kinerja penyaluran anggaran. Angka ini tergolong dalam kategori efektif karena berada dalam rentang 80%-100%.

Efisiensi Kinerja KPPN Makassar I tahun 2020-2021

Tabel di bawah ini memperlihatkan hasil perhitungan Efisiensi Kinerja KPPN Makassar I tahun 2020-2021:

Tabel 2. Perhitungan Efisiensi Kinerja tahun 2020-2021

Tahun	Efisiensi	Keterangan
2020	Rp. 146.711.804	Realisasinya Rp. 146.711.804 per satu SP2D yang diterbitkan
2021	Rp. 139.942.250	Realisasinya Rp. 139.942.250 per satu SP2D yang diterbitkan, lebih rendah dari tahun sebelumnya (kurang efisien)

Sumber: data diolah dari OM-SPAN (2025)

Berdasarkan tabel di atas, efisiensi penyaluran pada tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata satu dokumen SP2D digunakan untuk menyalurkan dana sebesar Rp. 146.711.804 yang menggambarkan efisiensi administratif yang cukup tinggi.

Namun pada tahun 2021, rasio efisiensi menurun menjadi Rp. 139.942.250 per satu dokumen SP2D yang berarti bahwa nilai dana yang dicairkan per dokumen menjadi lebih kecil. Hal ini menunjukkan adanya penurunan efisiensi administratif karena untuk menyalurkan jumlah anggaran yang relatif sama atau meningkat.

Rasio Efektivitas KPPN Makassar I tahun 2022-2024

Hasil perhitungan rasio efektivitas KPPN Makassar I tahun 2022-2024 dapat disimpulkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Perhitungan Rasio Efektivitas tahun 2022-2024

Tahun	Efektivitas	Keterangan
2022	96,74 %	Efektif
2023	97,04 %	Efektif
2024	94,80 %	Efektif

Sumber: data diolah dari OM-SPAN (2025)

Efektivitas penyaluran anggaran oleh KPPN Makassar I pada tahun 2022 hingga 2024 dianalisis berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dan pagu anggaran satuan kerja mitra. Rasio ini menunjukkan sejauh mana alokasi anggaran dapat direalisasikan sesuai rencana. Semakin tinggi nilai efektivitas, semakin optimal penyerapan anggaran yang difasilitasi oleh KPPN.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022, tingkat efektivitas penyaluran anggaran mencapai 96,74% yang menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran yang dialokasikan kepada satuan kerja berhasil direalisasikan. Hal ini mencerminkan bahwa peran KPPN sebagai penyalur anggaran telah berjalan dengan sangat baik. Nilai ini berada dalam kategori efektif yakni 80%-100%.

Pada tahun 2023, efektivitas meningkat menjadi 97,40% yang menunjukkan perbaikan kinerja dalam hal penyaluran dan penyerapan anggaran oleh satuan kerja. Nilai ini berada dalam kategori efektif (80%-100%) dan mendekati capaian maksimal yaitu 100%.

Sementara itu pada tahun 2024, efektivitas sedikit menurun menjadi 94,80% namun tetap berada dalam kategori efektif. Penurunan ini masih berada dalam batas wajar dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

Secara keseluruhan, efektivitas penyaluran anggaran oleh KPPN Makassar I selama tahun 2022-2024 tergolong konsisten tinggi dengan nilai selalu di atas 90%. Hal ini mencerminkan kinerja yang baik dalam mendukung pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja mitra.

Efisiensi Kinerja KPPN Makassar I tahun 2022-2024

Hasil perhitungan rasio efisiensi kinerja KPPN Makassar I tahun 2022-2024 dapat disimpulkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Perhitungan Efisiensi Kinerja tahun 2022-2024

Tahun	Efisiensi	Keterangan
2022	Rp. 139.545.460	Realisasi Rp. 139.545.460 per satu SP2D yang diterbitkan, efisiensi relatif rendah dibandingkan tahun 2021
2023	Rp. 210.523.391	Realisasi Rp. 210.523.391 per satu SP2D yang diterbitkan, efisiensi tertinggi sepanjang periode
2024	Rp. 196.523.864	Realisasi Rp. 196.523.864 per satu SP2D yang diterbitkan, sedikit menurun dari tahun 2023 namun masih cukup efisien

Sumber: data diolah dari OM-SPAN (2025)

Efisiensi penyaluran anggaran pada KPPN Makassar I diukur dengan membandingkan total realisasi anggaran terhadap jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan. Nilai ini mencerminkan rata-rata dana yang disalurkan melalui setiap SP2D. Semakin besar nilai per SP2D, maka semakin efisien secara administratif karena menunjukkan bahwa setiap dokumen mencakup nilai transaksi yang lebih besar sehingga beban administrasi relatif lebih rendah.

Tabel diatas menyajikan hasil perhitungan efisiensi selama tiga tahun terakhir yang dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022, nilai efisiensi penyaluran sebesar Rp. 139.545.460 per satu SP2D yang diterbitkan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap dokumen SP2D menyalurkan dana

dalam jumlah yang relatif sedang. Apabila dibandingkan dengan rasio efisiensi tahun 2021 dapat dikatakan bahwa efisiensi administratif pada tahun 2022 masih kurang.

Kemudian pada tahun 2023, rasio efisiensi menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan nilai efisiensi mencapai Rp. 210.523.391 per satu SP2D yang diterbitkan. Nilai ini sekaligus menjadi nilai tertinggi selama periode penelitian. Apabila dibandingkan dengan rasio efisiensi tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa efisiensi administratif tahun 2023 sangat efisien.

Selanjutnya pada tahun 2024, rasio efisiensi mengalami sedikit penurunan menjadi Rp. 196. 523.864 per satu SP2D yang diterbitkan. Nilai ini masih tergolong efisien apabila dibandingkan dengan tahun 2022 namun kurang efisien apabila dibandingkan dengan tahun 2023. Akan tetapi, penurunan ini masih dalam batas wajar dan tidak menunjukkan kemunduran yang signifikan.

Secara umum, tren efisiensi penyaluran anggaran menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan kinerja tertinggi pada tahun 2023. Hasil ini dapat menunjukkan bahwa KPPN Makassar I telah mampu meningkatkan kualitas pelayanan pencairan anggaran secara administratif.

DISKUSI

Rasio Efektivitas KPPN Makassar I tahun 2022-2024

Efektivitas penyaluran anggaran oleh KPPN Makassar I diukur berdasarkan rasio antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran dari satuan kerja mitra. Rasio ini menunjukkan sejauh mana anggaran yang dialokasikan dapat direalisasikan secara optimal. Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas selama periode 2020 hingga 2024, diperoleh nilai efektivitas masing-masing sebesar 93,98% pada tahun 2020; 96,91% pada tahun 2021; 96,74% pada tahun 2022; 97,04% pada tahun 2023, dan 94,80% pada tahun 2024. Seluruh nilai tersebut berada dalam rentang 80%-100% yang termasuk dalam kategori efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja KPPN Makassar I sebagai penyalur anggaran menunjukkan konsistensi dalam memfasilitasi penyerapan anggaran oleh satuan kerja secara optimal. Kenaikan nilai efektivitas dari tahun 2020 hingga 2023 mencerminkan peningkatan dalam kelancaran pelaksanaan anggaran, sementara mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 namun masih berada dalam batas yang wajar dan tetap tergolong dalam kategori efektif. Dengan demikian, hipotesis pada penelitian ini dapat diterima yakni efektivitas realisasi anggaran KPPN Makassar I memenuhi kriteria baik.

Peningkatan efektivitas dari tahun 2020 hingga 2023 dapat disebabkan oleh peningkatan koordinasi dan bimbingan teknis dari KPPN kepada satuan kerja, percepatan proses pencairan

anggaran, serta semakin baiknya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja mitra. Selain itu, penerapan sistem digital juga mendorong efisiensi proses pencairan yang berdampak pada kelancaran realisasi anggaran.

Sementara itu meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024, nilai efektivitas masih tergolong tinggi dan tetap berada dalam kategori efektif. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kegiatan yang tertunda atau tidak terlaksana, revisi DIPA di akhir tahun, atau adanya efisiensi belanja oleh satuan kerja itu sendiri yang menyebabkan sebagian pagu tidak terealisasi. Selain itu, kebijakan refocusing atau perubahan prioritas anggaran juga dapat mempengaruhi kemampuan satuan kerja menyerap anggaran secara penuh.

Efisiensi Kinerja KPPN Makassar I tahun 2022-2024

Efisiensi penyaluran anggaran diukur dengan membandingkan total realisasi anggaran terhadap jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan sehingga diperoleh rata-rata nilai rupiah yang disalurkan per satu SP2D. Semakin tinggi nilai realisasi per SP2D maka secara administratif semakin efisien karena semakin sedikit dokumen yang diterbitkan untuk menyalurkan dana dalam jumlah besar.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2020, efisiensi mencapai Rp. 146.711.804 per SP2D yang diterbitkan, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp. 139.942.250 dan kembali turun pada tahun 2022 menjadi Rp. 139.545.460. meskipun berada dalam kisaran yang masih wajar, nilai tersebut menunjukkan bahwa proses penyaluran pada tahun-tahun tersebut belum mencapai efisiensi maksimal.

Penurunan efisiensi yang terjadi pada tahun 2020-2022 dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah SP2D dengan nilai transaksi yang lebih kecil karena banyaknya permintaan pencairan secara bertahap oleh satuan kerja, atau adanya kegiatan-kegiatan rutin dengan nilai transaksi kecil namun frekuensinya tinggi. Hal ini menyebabkan beban administratif meningkat karena KPPN Makassar I harus memproses lebih banyak dokumen untuk menyalurkan anggaran dengan total nilai yang tidak jauh berbeda.

Akan tetapi, pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan dengan nilai efisiensi mencapai Rp. 210.523.391 per SP2D yang diterbitkan yang merupakan nilai tertinggi selama periode penelitian. Kenaikan ini menunjukkan bahwa penyaluran dana dilakukan dalam jumlah yang lebih besar per dokumen sehingga proses administrasi menjadi lebih ringan dan efisien. Faktor yang mempengaruhi peningkatan ini dapat disebabkan oleh perbaikan pengelolaan permintaan dana oleh satuan kerja, penggabungan SP2D per kegiatan, serta peningkatan akurasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Pada tahun 2024, efisiensi sedikit menurun menjadi Rp. 196.523.864 per SP2D tetapi tetap menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tiga tahun pertama. Semakin besar nilai realisasi per SP2D mencerminkan proses penyaluran yang semakin efisien secara administratif karena jumlah dokumen yang diterbitkan lebih sedikit untuk menyalurkan dana yang lebih besar. Penurunan ini dapat disebabkan oleh meningkatnya kembali jumlah SP2D akibat percepatan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun atau karena adanya pengajuan SP2D dalam jumlah kecil yang dipisah oleh satuan kerja misalnya untuk menyesuaikan dengan pelaporan output kegiatan.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun efisiensi sempat menurun pada awal periode, tren efisiensi penyaluran anggaran oleh KPPN Makassar I meningkat signifikan pada dua tahun terakhir sehingga menunjukkan perbaikan kinerja administratif dan dapat dikatakan cukup efisien. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa efisiensi realisasi anggaran KPPN Makassar I memenuhi kriteria baik dapat diterima.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Efektivitas realisasi anggaran KPPN Makassar I selama lima tahun terakhir secara konsisten berada pada kategori efektif dengan rasio efektivitas berkisar antara 93,98% hingga 97,40%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pagu anggaran yang dialokasikan kepada satuan kerja mitra berhasil direalisasikan dengan baik. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi antar tahun, penyaluran anggaran telah berjalan secara optimal dan mencerminkan kinerja KPPN yang baik dalam mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran.

Efisiensi penyaluran anggaran menunjukkan tren yang fluktuatif namun membaik pada dua tahun terakhir. Rasio efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 210.523.391 per satu SP2D yang diterbitkan menunjukkan tingkat efisiensi administratif yang sangat baik. Sementara tahun-tahun sebelumnya menunjukkan efisiensi yang relatif lebih rendah. Peningkatan efisiensi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam proses pengelolaan permintaan pencairan dana dan penyaluran anggaran yang lebih terkoordinasi.

REKOMENDASI

KPPN Makassar I diharapkan mempertahankan dan meningkatkan kinerja efektivitas penyaluran anggaran melalui koordinasi yang intensif dengan satuan kerja mitra, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian penyerapan anggaran secara berkala. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan jumlah

periode penelitian agar dapat menjelaskan tren efektivitas dan efisiensi kinerja KPPN Makassar I khususnya penyaluran anggaran dengan lebih lengkap. Selain itu peneliti selanjutnya dapat menambahkan pendekatan wawancara dengan pihak KPPN dan satuan kerja guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

REFERENSI

- Anita, D. & Fadilah, M.N. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung Tahun Anggaran 2019-2023. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 10(4).
- Bastian, I. (2017). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Budianto. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran pada KPPN Bandung II, *Jurnal Keuangan dan Akuntansi*.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022). *Profil Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djpbn.kemenkeu.go.id>
- Devinci, M.Y., Dekrita, Y.A., & Samosir, M.S. (2023). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sikka. *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 3(1).
- Dwifarchan, R. M. R. & Sulistiyanti, U. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Kasus Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) di Kabupaten Magelang). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(4).
- Halim, A., & Kusufi, M.S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hidayati. (2021). Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran pada KPPN Jakarta I, *Jurnal Akuntansi Keuangan*.
- Jarkasih, M., Ruliana, T., & Rachmawati, I. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 11(1).
- Kholifaturrahmah, D.A., Murjana, I.M., & Arsana, I.N. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(3).
- Lisnasari, Guasmin, & Haryani, S. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(2).
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPF.
- Maidar, & Rosalia, H. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2020. *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 10(6).
- Makaminang, N.E., Ilat, V., & Wokas, H.R.N. (2022). Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum*, 6(1).
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.

- Mardiasmo. (2009). *Reformasi Kebijakan dan Manajemen Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Revisi)*. Yogyakarta : Andi.
- Murdani, Suherlan. A. (2014). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan dalam APBD Kabupaten Aceh Besar pada Periode 2008-2012. *Jurnal Signifikan*, 3(2).
- Nurhidayah, A., Bremara, N.P., & Maya, M.W. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2019-2022. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2).
- OECD. (2016). *Performance Budgeting : Linking Funding and Results*. Paris : OECD Publishing
- Oktaviani, N.R. & Mulyandani, V.C. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Langsung Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 2(2).
- Pappa, L., Menne, F. & Suriani, S. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. *Indonesian Journal of Business and Management*, 6(1).
- Pebriani, L. E. (2019). Analisis Realisasi Anggaran dalam Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja KPPN Singaraja Tahun 2016–2018. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 8(2).
- Perwitasari, D.A., Haidiputri, T.A.N., & Rustinawati, M. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Keuangan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggi Periode 2020. *Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 14(2).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Rahmi, S.D., Morasa, J., & Tirayoh, V.Z. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2020 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 11(1).
- Sudirman. (2023). Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran pada KPPN Palembang. *Jurnal Manajemen Keuangan Negara*.
- Utomo, D. M. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan PMK No. 249 Tahun 2011 (Studi pada KPPN Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 5(1), 110–120.
- Wahyuni. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran pada KPPN Surabaya II, *Jurnal Keuangan Negara*.
- Yani, D. (2020). Evaluasi kinerja penyerapan anggaran di instansi pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(2), 150–158.